

## PERGUMULAN ISLAM DAN POLITIK DI INDONESIA

**M. Abduh Wahid**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: wahiduabduh@gmail.com

### Abstrak

*Hubungan agama dan politik telah lama diperdebatkan. Bagi pandangan Integralistik memahami bahwa agama dan politik adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, namun bagi pandangan sekularisme memahami bahwa agama bersifat teologis dan privat sementara itu politik murni berbicara keduniawian. Perdebatan ini juga merangsek masuk dalam diskursus keislaman dan politik di Indonesia. Sejarah perjalanan politik Indonesia menunjukkan sebuah pergumulan yang sangat panjang dan variatif. Kenyataan tersebut, dapat dilihat sejak masa kesultanan, masa penjajahan, dan masa kemerdekaan dengan berbagai gerakan politik yang mewarnai masa-masa tertentu. Visi politik yang disodorkan paling tidak ada tiga model, yaitu: 1) Islam sebagai kultur politik, di mana simbol-simbol yang tidak terdapat dalam doktrin, tetapi diwariskan dari generasi terdahulu, 2) Islam sebagai etika politik di mana nilai-nilai etika yang terdapat dalam doktrin, dan 3) Islam sebagai ideologi politik, di mana Islam diperjuangkan menjadi dasar negara atau setidaknya-tidaknya syari'at Islam diakui oleh negara meskipun hanya berlaku bagi pemeluknya.*

### Kata Kunci:

*Islam, Politik Islam, Politik Indonesia*

### Abstract

*Religious and political relations have long been debated. For the Integralistic view, understanding that religion and politics is an inseparable unity, but for the view of secularism, understanding that religion is theological and private while pure politics speaks worldly. Moreover, this debate also enters into Islamic and political discourse in Indonesia. The history of Indonesia's political journey shows a very long and varied struggle. These facts can be seen from the time of the sultanate, the colonial period, and the period of independence with various political movements that color certain times. The political vision offered is at least three models, namely: 1) Islam as a political culture, where symbols are not contained in doctrine, but are inherited from previous generations, 2) Islam as a political ethic in which ethical values are contained in doctrine, and 3) Islam as a political ideology, in which Islam is fought for as the basis of the state or at least the Islamic Shari'ah is recognized by the state even though it only applies to its followers.*

### Keywords:

*Islam, Islamic Politics, Indonesian Politics*

## Pendahuluan

Islam, perbincangan seputar hubungan agama dengan politik adalah sebuah wacana klasik. Meski telah menjadi fokus diskusi selama berabad-abad, persoalan tersebut tidak pernah terjawab secara tuntas. Pada era yang semakin kompleks ini, diskusi tentang hubungan keduanya semakin hangat dan marak diperbincangkan bersamaan dengan kebangkitan umat Islam di seantero dunia Islam. Sebab pada dasarnya, Islam adalah satu sistem kepercayaan di mana agama mempunyai kaitan erat dengan politik. Islam memberikan kerangka makna dan cara pandang bagi individu ataupun bagi masyarakat, termasuk dalam bidang politik.

Islam dan politik merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan, karena memiliki hubungan dalam bentuk interrelasi secara fungsional, yaitu Islam berfungsi bagi politik dan sebaliknya politik juga berfungsi bagi Islam. Hubungan yang erat antara Islam dan politik dapat dilihat dari dua hal; *pertama*, dari aspek Islam sebagai doktrin, seperti konsep *ulul amri* (QS. Al-Nisa [4]: 59), *syura* (QS. Al-Syura [42]: 38), dan sebagainya. *Kedua*. Dari aspek Islam sebagai suatu realita sosial, dapat dilihat sejarah terbentuknya pemerintahan Madinah melalui kontrak politik (Piagam Madinah) antara Nabi Muhammad saw, dengan penduduk Madinah yang terdiri atas kelompok Muhajirin, kelompok Anshar, dan kelompok Yahudi.<sup>1</sup>

Karena itu, Islam dan politik merupakan tema yang sangat menarik bagi para peneliti dan penulis sejarah masyarakat Islam, baik oleh sejarawan Barat maupun oleh sejarawan muslim sendiri. Hal ini dapat dilihat perdebatan yang terjadi seputar Islam dan politik, khususnya di Indonesia berlangsung sejak masa sebelum kemerdekaan.

Sejarah Indonesia di dalamnya terdapat sejarah masyarakat Islam, pada mulanya bersifat politik sentris. Peranan Islam dalam politik berupa kerajaan Islam dan organisasi politik Islam, sedangkan dinamika dan pergolakan politik kurang mendapat perhatian. Dalam menguraikan sejarah pergumulan politik itu perlu diperhatikan *dramatic personae* atau aktor sejarah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat M. Shaleh A. Putuhena, *Islam dan Politik, Pergumulan tanpa Akhir: Rekonstruksi Pantulan Pengalaman Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Adab IAIN Alauddin Kamis 11 Nopember 2004, h. 2-4.

<sup>2</sup> Dalam ulasan ini, aktor dibagi atas dua kelompok, yaitu Islamis dan pemerintah. Kelompok Islamis adalah aktor yang pandangan serta sikapnya merujuk pada doktrin Islam, sedangkan pemerintah adalah aktor yang mendasarkan pandangan dan sikapnya pada kepentingan politik pemerintahan. Lihat *ibid.*, h. 5.

Mengaitkan Islam dengan politik Indonesia merupakan hal yang sangat esensial dan bahkan krusial. Sebagai agama yang dominan dalam masyarakat Indonesia, Islam telah menjadi unsur yang paling berpengaruh dalam budaya Indonesia. Kendatipun Islam hanya berperan marjinal dalam wilayah kehidupan politik nasional. Hal ini antara lain disebabkan adanya dikotomi “Politik Islam” dan “non-politik Islam” di kalangan umat Islam Indonesia yang telah berlangsung lama. Dikotomi tersebut lahir dari sifat dasar Islam Indonesia yang heterogen.<sup>3</sup>

Sejarah perjalanan politik Indonesia menunjukkan sebuah pergumulan yang sangat panjang dan variatif. Kenyataan tersebut, dapat dilihat sejak masa kesultanan, masa penjajahan, dan masa kemerdekaan dengan berbagai gerakan politik yang mewarnai masa-masa tertentu. Dan visi politik yang disodorkan paling tidak ada tiga model, yaitu: 1) Islam sebagai kultur politik, di mana simbol-simbol yang tidak terdapat dalam doktrin, tetapi diwariskan dari generasi terdahulu, 2) Islam sebagai etika politik di mana nilai-nilai etika yang terdapat dalam doktrin, dan 3) Islam sebagai ideologi politik, di mana Islam diperjuangkan menjadi dasar Negara atau setidaknya syari’at Islam diakui oleh Negara meskipun hanya berlaku bagi pemeluknya.

### **Islam dan Politik di Indonesia**

Islam datang ke Indonesia melalui proses perjalanan yang cukup jauh dari Timur Tengah sampai ke Asia Tenggara. Sulit diketahui waktu yang pasti kedatangan Islam ke Indonesia, tetapi kemungkinan Islam telah di bawah ke Indonesia sejak abad I Hijriah.<sup>4</sup> Namun suatu kenyataan yang pasti bahwa kedatangan Islam ke Indonesia dilakukan secara damai.<sup>5</sup>

Islam di Indonesia baik secara historis, sosiologis maupun politis sangat kompleks, sehingga terdapat banyak masalah, misalnya tentang sejarah dan perkembangan awal Islam. Karena itu, para sarjana sering berbeda pendapat. Demikian pula tentang babakan sejarah politik Islam Indonesia, dapat dilihat secara priodik, yaitu

---

<sup>3</sup> Lihat M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru* (Jakarta: Logos, 2001), h. 21.

<sup>4</sup> Lihat T. W. Arnold, *The Preaching of Islam* (London: Constable & company Ltd., 1913), h. 363-364. Lihat pula Uka Tjandrasasmita, *Proses Kedatangan Islam dan Munculnya Kerajaan-Kerajaan Islam di Aceh*, dalam A. Hasymy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia* (Bandung: PT. Al-Maarif, 1993), h. 358-359.

<sup>5</sup> Azyumardi Azra, *Renaissance Islam Asia Tenggara, Sejarah Wacana dan Kekuasaan* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1999), h. 8.

masa kesultanan, masa penjajahan, masa kemerdekaan yang meliputi masa orde lama, orde baru dan masa reformasi.

### **Masa Kesultanan**

Cikal bakal kekuasaan Islam telah dirintis pada periode abad ke 7-8 M, tetapi semuanya tenggelam dalam hegemoni maritim Sriwijaya yang berpusat di Palembang dan Kerajaan Majapahit di Jawa. Pada periode ini, baru dalam proses penyebaran Islam melalui para pedagang sekaligus mubalig.<sup>6</sup>

Menjelang abad ke 13 M, di pesisir Aceh sudah ada pemukiman muslim sebagai pengaruh persentuhan antara penduduk pribumi dengan pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India, yang sudah berlangsung lama. Akhirnya, di wilayah ini berdiri kerajaan Islam yang pertama pada pertengahan abad ke-13, yaitu kerajaan Samudra Pasai.<sup>7</sup>

Berdirinya kerajaan Samudra Pasai merupakan awal terbentuknya kultur politik Islam di Nusantara dengan mengadopsi simbol-simbol tradisi Islam di Timur Tengah. Penggunaan gelar sultan,<sup>8</sup> mengikuti tradisi politik Islam yang digunakan oleh penguasa non-Arab yang sangat dominan setelah runtuhnya khalifah Abbasiyah pada 1258. Tradisi lain, dapat pula dilihat berupa pemakaian aksara Arab-Melayu untuk membuat dokumen resmi negara, penggunaan tahun Hijriyah untuk kalender resmi negara, dan adanya mesjid kerajaan tempat Sultan shalat Jum'at yang dalam setiap khutbah namanya disebut dan dido'akan.<sup>9</sup>

Dalam tradisi kultur politik Islam, Sultan menjalankan dua fungsi utama, yaitu sebagai penguasa dan sebagai pelindung agama Islam. Seorang Sultan ketika dilantik ia

---

<sup>6</sup> Masuknya Islam ke Nusantara melalui proses yang dimulai dengan kedatangan Islam, yang disusul dengan penerimaan Islam, dan selanjutnya dengan pelembagaan Islam. Kedatangan Islam adalah satu tahap di mana orang-orang yang beragama Islam yang berasal dari luar datang ke suatu daerah tertentu. Sedangkan penerimaan Islam adalah pada saat adanya masyarakat peribumi atau penduduk setempat yang menerima Islam sebagai agamanya. Sementara pelembagaan Islam adalah saat mana ajaran Islam telah melembaga atau memasuki struktur masyarakat. Lihat M. Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia* (Yogyakarta: LKIS, 2007), h. 83.

<sup>7</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali, 1994), h. 196.

<sup>8</sup> Gelar Sultan untuk pertama kalinya digunakan oleh Tughril (1037-1063) pendiri kerajaan Saljuk, atas persetujuan Khalifa Al-Qaim (1031-1075) dari Daulah Abbasiyah. Sejak saat itu, gelar khalifah digunakan oleh penguasa non-Arab sebagai vassal dan pemegang otoritas sesungguhnya dari Bani Abbasiyah di wilayahnya. Gelar tersebut kemudian digunakan pula oleh penguasa Islam Nusantara. Lihat catatan kaki M. Shaleh A. Putuhena, *Historiografi, op. cit.*, h. 91.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 91-92.

diberi julukan yang menggambarkan visinya. Misalnya, di Yogyakarta Sultan diberi julukan *panata gama* (pengatur/penjaga agama). Dalam kedudukan seperti itu, Sultan berkewajiban untuk menyebarkan dan mempertahankan agama Islam dan seluruh warga kerajaan harus beragama Islam.<sup>10</sup>

Sementara itu, Islamisasi di Jawa memasuki tahap pelebagaan berlangsung pada awal abad ke 16 M, yang ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam pertama di Jawa, Demak.<sup>11</sup> Menurut historiografi tradisional Jawa bahwa kerajaan Demak itu didirikan oleh Raden Fatah, seorang putra raja Majapahit yang beristrikan seorang gadis dari Campa.<sup>12</sup> Tome Pires menyatakan bahwa kakek raja Demak yang memerintah pada 1513 adalah seorang hamba dari Gresik. Namun karena keberaniannya dalam perang maka ia diangkat menjadi *capitan* dan diberi gelar *pate*.<sup>13</sup>

Demak menjadi negara Islam pada tahun 1524 M, dengan dilantiknya Trenggana alias Ki Mas Palembang sebagai Sultan dengan nama baru Sultan Ahmad Abdul Arifin. Ia tercatat sebagai raja Jawa pertama yang menyandang gelar Sultan.<sup>14</sup> Untuk menggambarkan identitasnya sebagai suatu kerajaan Islam, dibangun mesjid Demak. Adapun yang menjadi imam sekaligus penasehat spiritual sultan adalah para wali, dan salah satu yang terkenal adalah Sunan Kalijaga. Dari Demak, Islamisasi dilancarkan ke pedalaman Jawa Tengah dan Jawa Barat melalui sarana politik, yaitu penaklukan penguasa setempat. Di samping Islamisasi melalui dakwah tetap dijalankan oleh para Wali Songo.<sup>15</sup>

Perkembangan Islam di Pulau Jawa bersamaan waktunya dengan melemahnya posisi raja Majapahit. Hal itu memberi peluang kepada raja-raja Islam pesisir untuk membangun pusat-pusat kekuasaan yang independen. Demak akhirnya berhasil menggantikan Majapahit sebagai Kraton Pusat.<sup>16</sup> Perkembangan selanjutnya, berdiri beberapa kerajaan Islam yang lain di Jawa, yaitu Pajang, Mataram, Cirebon, dan Banten.

---

<sup>10</sup> M. Shaleh A. Putuhena, *Islam...., op. cit.*, h. 9.

<sup>11</sup> M. Shaleh A. Putuhena, *Historiografi, op. cit.*, h. 95.

<sup>12</sup> Sartono Kartodirdjo dkk, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru*, jilid 1 (Jakarta: Gramedia, 1987), h. 28.

<sup>13</sup> H. J. De Graaf dan Th. G. Th., *Pigeand, Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa* (Jakarta: Grafiti Pers, 1989), h. 41.

<sup>14</sup> M. Shaleh A. Putuhena, *Historiografi, op. cit.*, h. 96.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Taufik Abdullah, *Islam dan Pembentukan Tradisi di Asia Tenggara dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique* (cd.), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara* (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 73.

Islamisasi di Kalimantan, memasuki tahap pelebagaan sekitar tahun 1526 M, ketika Pangeran Samudra memeluk Islam beserta seluruh kerabat Kraton dan penduduk Banjar. Pangeran Samudra, setelah masuk Islam, diberi nama Sultan Suryanullah atau Suriansyah, dan dinobatkan sebagai raja pertama dalam kerajaan Islam Banjar. Ketika Suryanullah naik tahta, beberapa daerah sekitarnya sudah mengakui kekuasaannya, yaitu Sambas, Batanglawai, Sukadana, Kota Waringin, Sampit, Medawi, dan Sambangan.<sup>17</sup>

Kawasan Timur Nusantara, Maluku dan sekitarnya, Islamisasi berlangsung sejak pertengahan abad ke-13 M. namun pelebagaan Islam terjadi ketika kerajaan Ternate berubah menjadi kesultanan Ternate dengan penobatan Zainal Abidin (1486-1500 M) sebagai sultan pertama. Konversi Ternate ini diikuti oleh tiga kerajaan lainnya, yaitu Tidore, Jailolo dan Bacan. Ibu kota kesultanan menjadi pusat penyiaran Islam, dan atas pengaruh Ternate dan Tidore, kerajaan-kerajaan kecil di Maluku yang mengakui hegemoni kedua kesultanan itu, menerima Islam. Bahkan kesultanan Tidore sangat berperan dalam proses pengislaman sebagian masyarakat yang mendiami kepulauan Raja Ampat dan pesisir kepala burung di Irian Jaya.<sup>18</sup>

Di Sulawesi Selatan, tahap awal Islamisasi berlangsung pada pertengahan abad ke-16, dengan berdomisilinya sebagian pedagang muslim Melayu dan Jawa di Somba Opu, pusat pelabuhan kerajaan Gowa.<sup>19</sup> Sesuai catatan resmi kesultanan Gowa dan Tallo, Islam diterima di kerajaan kembar ini pada 22 September 1605, bertepatan dengan 9 Jumadil Awwal 1014 H. Selanjutnya, tahap pelebagaan Islam di daerah ini dimulai pada 9 Nopember 1607 atau 19 Rajab 1016 H., ketika diadakan shalat Jum'at pertama dan dinyatakan Islam sebagai agama resmi kerajaan, dan seluruh rakyat kedua kerajaan tersebut dinyatakan telah memeluk Islam. Kesultanan Gowa kemudian menyebarkan Islam ke daerah-daerah lain Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara.<sup>20</sup>

Konstruksi masuk dan tersebarnya Islam di beberapa daerah nusantara, dapat dipahami bahwa proses Islamisasi berlangsung secara parsial dan bertahap, yang

---

<sup>17</sup> Taufik Abdullah (ed)., *Sejarah Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: MUI, 1992), h. 87.

<sup>18</sup> M. Shaleh A. Putuhena, *Historiografi*, *op. cit.*, h. 101.

<sup>19</sup> Mattulada, *Agama Islam di Sulawesi Selatan* dalam Taufik Abdullah (ed)., *Islam dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1983), h. 3.

<sup>20</sup> M. Shaleh A. Putuhena, *Historiografi*, *op. cit.*, h. 103.

dimulai dengan kedatangan Islam, penerimaan Islam, dan pelembagaan Islam. Pada tahap ketiga ini Islam sudah mulai bersentuhan dengan politik, dengan terbentuknya kultur politik Islam dengan penggunaan simbol-simbol Islam dalam kerajaan. Namun, hubungan Islam dan politik pada masa kesultanan ini, berada pada tataran Islam sebagai kultur politik.

## **Masa Penjajahan**

### *a. Masa Penjajahan Belanda*

Ketika VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) berhasil menjadi pemegang hegemoni politik di Jawa, maka raja kehilangan kekuasaan politiknya. Bahkan, kewibawaan raja sangat tergantung kepada VOC. Campur tangan kolonial terhadap kehidupan keraton makin meluas, sehingga ulama-ulama keraton sebagai penasehat raja tersingkir.

Jika pada abad ke-16 dan ke-17, Sultan dan ulama menyatu dalam struktur kesultanan dan menempatkan posisi mereka sebagai pemimpin dan penanggungjawab Islam, maka abad ke-19 aktivis Islam telah beralih kepada para tokoh dan ulama (Islamis) yang berada di luar struktur pemerintahan. Jadi dapat dikatakan bahwa pada abad ke-19 kesultanan, pemerintahan tradisional Islam, telah kehilangan kekuasaannya dan telah menjadi alat pemerintah Hindia Belanda. Karena itu simbol-simbol kultur politik sudah kehilangan makna dan fungsi, dan sultan tidak lagi dipandang sebagai pelindung dan pinnata agama Allah serta pemelihara kemauan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>21</sup>

Bersamaan dengan kemunduran politik tersebut, terjadi pula kemerosotan ekonomi dengan hancurnya pusat-pusat ekonomi yang pernah berkembang pada periode kejayaan Islam (abad ke-13-16). Sementara pemerintah Hindia Belanda makin mendominasi kehidupan politik dan mengeksploitasi ekonomi pribumi untuk kepentingan VOC. Dalam kondisi seperti itu rakyat bergabung kepada pemimpin non formal, yaitu para ulama dan bangsawan yang menggalang rakyat untuk melawan dan berjuang atas nama agama.<sup>22</sup> Karena itu, pada abad ke 19 terjadilah beberapa peristiwa yang menunjukkan tuntutan terhadap pelaksanaan kekuasaan secara etis sebagai yang

---

<sup>21</sup> M. Shaleh A. Putuhena, *Islam...*, *op. cit.*, h. 19-20.

<sup>22</sup> Msurifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), h. 32.

dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Hal tersebut terlihat dengan terjadinya perlawanan terhadap pemerintah colonial dalam perang.

Tahun 1821-1837, terjadi perang Padri yang dipimpin oleh Imam Bonjol, dibantu delapan ulama yang bergelar "Harimau nan salapan". Awalnya gerakan Paderi ini dilakukan melalui ceramah di Surau dan Mesjid untuk menentang dan memberantas kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan Islam seperti judi, sabung ayam, minuman keras, dan lain-lain. Namun gerakan ini mendapat perlawanan dari kelompok penghulu, sehingga terjadilah konflik terbuka atas kaum Paderi melawan kaum adat atau penghulu yang dibantu oleh Belanda. Menurut kaum Paderi pemerintah colonial tidak etis, karena telah memihak kemungkaran.<sup>23</sup>

Di Jawa, sekitar tahun 1852-1830 terjadi perang Diponegoro, yang berawal dari rasa keadilan yang terinjak-injak dan kewajaran cultural yang telah ternoda disebabkan oleh intervensi Belanda yang terlalu jauh terhadap kesultanan Yogyakarta. Di samping itu pembuatan jalan baru dekat Tegalrejo dengan mengambil secara paksa tanah milik Pangeran Diponegoro memicu perlawanan. Pemberontakan meluas ke Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan bergabungnya sejumlah bupati dan komunitas serta tokoh agama seperti Kiai Madja.<sup>24</sup>

Demikian pula perang perlawanan yang terjadi di daerah-daerah lain seperti perang Aceh, perang Banjar, perang Banten, dan lain sebagainya. Semuanya merupakan bentuk perlawanan terhadap kemungkaran dan ketidakadilan. Walaupun perang tersebut selalu berakhir dengan kekalahan, tetapi peran politik ulama telah menjadi pelajaran politik umat Islam Indonesia untuk menggalang persatuan atas nama Islam dan telah memupuk cinta tanah air dan anti kolonial. Dalam periode ini, hubungan Islam dan politik berada pada tataran Islam sebagai etika politik.

#### *b. Masa Penjajahan Jepang*

Penjajahan Jepang yang berlangsung dari bulan Pebruari 1942 hingga bulan agustus 1945, merupakan masa transisi yang menandai berakhirnya kekuasaan Belanda di kawasan ini untuk semua tujuan praktis. Jepang menawarkan kepada Indonesia sebuah kesempatan untuk menyatukan kemerdekaan nasional dengan berbagai usaha

---

<sup>23</sup> M. Shaleh A. Putuhena, *Islam...*, *op. cit.*, h. 22.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 23. Lihat pula Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 17-18.



yang dilakukan, meskipun sesungguhnya Jepang mempunyai tujuan lain, yaitu memperoleh dukungan untuk perang Jepang.<sup>25</sup>

Periode pendudukan Jepang, kendatipun singkat, mungkin dapat dicatat sebagai episode pembukaan kembali keterlibatan umat Islam dalam dunia politik. Sumbangan terbesar Jepang bagi politik Islam Indonesia dapat dilihat dalam upayanya untuk menyatukan berbagai kekuatan Islam dalam suatu organisasi Masyumi, yang didukung oleh Muhammadiyah maupun NU.<sup>26</sup>

Tampaknya Jepang berusaha mempergunakan agama untuk mencapai tujuan perangnya. Mereka memandang Islam sebagai salah satu sarana yang penting untuk memperoleh dukungan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Dalam kaitan ini dapat dilihat dibentuknya kantor Urusan Agama, didirikan Masyumi dan pembentukan Hizbullah. Jadi berbeda dengan pemerintah Hindia Belanda, politik Islam pemerintah. Pendudukan Jepang memandang umat Islam sebagai mitra dengan memberlakukan Islam sebagai alat untuk mencapai tujuannya.

Masa akhir pendudukan Jepang, beralih orientasi dengan memberikan perhatian lebih banyak kepada kelompok rasionalis sekuler. Hal ini dapat dilihat dari wakil-wakil Islam yang duduk dalam BPUPKI dan PPKI, hanya sedikit.<sup>27</sup> Dalam komite inilah terjadi perdebatan ideologis yang serius antara kelompok Islam dan kelompok rasionalis sekuler. Pihak Islam mengusulkan gagasan negara Islam, yaitu negara Indonesia yang berdasarkan syariat Islam. Sementara pihak nasionalis sekuler, Supomo, mengemukakan bahwa Indonesia mempunyai keistimewaan-keistimewaan tertentu. Lebih dari itu, ia juga meragukan apakah syari'at Islam itu mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat moderat.<sup>28</sup>

Untuk tidak menimbulkan perpecahan, karena perdebatan ideologis yang berlarut, maka kompromi pun diambil. Akhirnya tercapailah kesepakatan bersama sebagai terumuskan dalam Piagam Jakarta, bahwa Pancasila merupakan dasar negara,

---

<sup>25</sup> Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), h. 143-144.

<sup>26</sup> Awalnya pembentukan Masyumi dimaksudkan untuk menggiring kekuatan Islam agar mau membantu Jepang dalam perang. Namun beberapa pihak yang terlibat dalam kepemimpinan Masyumi, seperti Wahid Hasyim dan lain-lain berusaha keras agar berdirinya Masyumi tidak semata-mata digunakan untuk kepentingan Jepang, dan usaha ini tampaknya berhasil baik. Lihat ulasan selengkapnya B. J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia 1946-1972* (Jakarta: Grafiti Pers, 1985), h. 9-11.

<sup>27</sup> Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam* (Bandung: Mizan, 1986), h. 81-82.

<sup>28</sup> Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 102-107.

dan rumusan sila pertama berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.<sup>29</sup>

Perumusan Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari adanya janji pemerintah Jepang di Tokyo yang diucapkan oleh Perdana Menteri Koiso dihadapan parlemen Jepang pada 7 September 1944 untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia sebagai hadiah dari pemerintah Jepang.<sup>30</sup> Namun, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Piagam Jakarta telah ditandatangani pada 22 Juni 1945 itu dibicarakan kembali. Karena alasan demi persatuan nasional, tujuh kata yang sangat berarti bagi umat Islam dihapus.

Diterimanya Pancasila sebagai ideologi negara serta dihapuskannya tujuh kata dari Piagam Jakarta dapat ditafsirkan sebagai kekalahan politik Islam. Kendatipun demikian, para pendukung gagasan negara Islam tidak menyerah begitu saja. Gerakan Darul Islam (1949) yang memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia (NII) yang dipimpin oleh Marjani Kartosuwiryo,<sup>31</sup> dan perjuangan wakil-wakil Islam di dalam sidang konstituante hasil pemilu 1955 untuk menggolkan kembali gagasan negara Islam, merupakan indikasi konsistensi perjuangan mereka.

### **Masa Kemerdekaan**

Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, maka persoalan yang dihadapi selanjutnya adalah masalah yang sangat asasi, yaitu masalah dasar dan ideology negara. Para wakil rakyat Indonesia yang duduk di PPKI ketika itu terbagi atas dua kelompok, satu pihak mereka yang mengajukan agar negara itu berdasarkan kebangsaan tanpa berkaitan dengan ideologi keagamaan dan pada pihak lainnya mereka yang mengajukan Islam sebagai dasar negara.

BPUPKI yang dibentuk oleh Jepang pada 29 April 1945 yang waktunya bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang, Tenno Haika.<sup>32</sup> Anggota BPUPKI terdiri dari atas 64 orang, dengan Radjiman Wedioningrat sebagai ketua, anggota-

---

<sup>29</sup> H. Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945* (Bandung: Pustaka, 1983), h. 26-27.

<sup>30</sup> Untuk ulasan selengkapnya baca C. Van Dijk, *Darul Islam; Sebuah Pemberontakan* (Cet. III; Jakarta: Grafiti Pers, 1999).

<sup>31</sup> H. Subandi Al-Marsudi, *Pancasila dan UUD 45 dalam Paradigma Reformasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), h. 17.

<sup>32</sup> A. G. Priggodogdo, *Perubahan Kabinet Presidensial Menjadi Parlementer* (Yogyakarta: Yayasan Fonds UGM, t.th), h. 12.

anggotanya, Soekarno, Agus Salim, Abikusno Tjokrosudjoso, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, dan lain-lain.<sup>33</sup> Mereka terdiri atas nasionalis, Islamis dan Jawa. Sidang BPUPKI (28 Maret s/d 1 Juni 1945) yang mendiskusikan UUD, diputuskan dua hal penting yang diperjuangkan oleh kelompok Islam ideologis, yaitu: “Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam dan negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya.

Pada sidang perdana PPKI, 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta sebagai Wakil Ketua mengusulkan agar frase “yang beragama Islam” dihapus dengan alasan presiden dengan sendirinya beragama Islam karena 95 % rakyat Indonesia memeluk agama Islam, dan agar UUD dapat diterima oleh daerah-daerah non-Islam. Demikian pula Muhammad Hatta mengusulkan supaya anak kalimat yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” pada pasal 29 ayat 1 UUD 45 itu dihapus saja. Sidang menerima usulan Hatta dan hilanglah kesempatan untuk menjadikan Islam sebagai ideology politik bagi Republik Indonesia.<sup>34</sup>

Kegagalan politik umat Islam di awal kemerdekaan, terutama dalam hubungannya untuk menjadikan Islam sebagai dasar dari ideologi negara memang merupakan suatu kenyataan pahit. Kegagalan tersebut, jika dilihat dari kebijaksanaan pemerintah kolonial Jepang untuk lebih mempersiapkan kalangan nasionalis sekuler dalam menyongsong Indonesia Merdeka. Demikian juga, tampaknya memang disebabkan oleh ketidakpastian para pemimpin Islam untuk menciptakan suatu manever-manuver politik yang dapat meyakinkan semua pihak bahwa gagasan ideology Islam bagi negara Indonesia merdeka tidak saja merupakan suatu kewajiban yang dapat dipahami, tetapi sekaligus merupakan kebutuhan.

Ketika Republik Indonesia sedang dicabik-cabik oleh Belanda yang ingin kembali menguasai politik Indonesia dengan mendirikan negara federal (1945-1950), Sukarmadji Maridjan Kartosuwiryo (1905-1962) pada tahun 1948 di Jawa Barat memproklamirkan dirinya sebagai Imam dari negara Islam Indonesia yang lebih terkenal dengan Darul Islam.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> M. C. Ricklefs, *A. History of Modern Indonesia* (London: The MacMillan Press, 1983), h. 196. Lihat pula M. Shaleh A. Putuhena, *Islam, op. cit.*, h. 43.

<sup>34</sup> M. Shaleh A. Putuhena, *Islam, op. cit.*, h. 44.

<sup>35</sup> Darul Islam didirikan sebagai pernyataan kekecewaan terhadap tokoh-tokoh Islam yang tidak mampu menjadikan Islam sebagai ideologi Negara RI, Republik Indonesia dianggap sebagai negara sekuler

Peluang untuk memperjuangkan kembali Islam sebagai ideologi negara tercipta ketika diselenggarakan pemilu 1955,<sup>36</sup> yang bertujuan untuk memilih anggota parlemen (DPR) dan anggota konstituante yang akan menyusun UUD yang tetap bagi RI. Konstituante hasil pemilu 1955 itu mengawali rangkaian sidangnya yang panjang pada 10 November 1956 di Bandung. Isu-isu pokok yang pernah diperdebatkan dalam sidang BPUPKI kembali mengemuka, yaitu dasar negara, bentuk negara, dan beberapa hal yang diperlukan untuk suatu UUD. Setelah hampir tiga tahun bersidang, berbagai isu telah diselesaikan, kecuali dasar negara. Dari berbagai konsep yang ditawarkan terpola dalam dua dasar yang sulit dikompromikan pada saat itu. Partai-partai Islam yang terdiri atas Masyumi, NU, PSII, dan Perti bersatu dalam Konstituante untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar negara.<sup>37</sup> berhadapan partai-partai non-Islam yang dimotori oleh PNI dan PKI yang mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara.

Tentang Islam sebagai dasar Negara misalnya, M. Natsir menegaskan pendiriannya bahwa Islam harus dijadikan dasar Negara Indonesia, mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Menurutnya, Indonesia hanya mempunyai dua pilihan, yaitu sekulerisme (*la-diniyah*) atau faham keagamaan (*dini*). Pancasila sebagai falsafah dan dasar bagi kami adalah kabur dan tak bisa berkata apa-apa kepada jiwa umat Islam yang sudah mempunyai satu ideologi yang jelas, lengkap, dan hidup dalam kalbu rakyat Indonesia sebagai tuntunan hidup dan sumber kekuatan lahir batin, yaitu Islam.<sup>38</sup>

Pertentangan pendapat dalam Majelis Konstituante tidak dapat dipertemukan. Untuk voting tidak mungkin karena kelompok Islam suaranya 44 %, dan kelompok Pancasila 56 %. Kondisi ini juga tidak akan berhasil mencapai Quorum, karena menurut aturan untuk menetapkan UUD harus diterima sekurang-kurangnya mencapai suara  $\frac{3}{4}$

---

dengan julukan negara setan, musuh Islam yang harus diperangi. Perlawanan Kartosuwiryo disusul oleh Kahar Muzakkar yang memproklamkan berdirinya Darul Islam di Sulawesi Selatan pada Januari 1952, dan di Aceh, seorang ulama, Daud Beureuh menyatakan perang terhadap RI dan menyatakan berdirinya NII/DII pada September 1953. Lihat *ibid.*, h. 45.

<sup>36</sup> Dalam pemilu 1955 itu, keluar sebagai empat besar adalah PNI (57 kursi), Masyumi (57 kursi), NU (45 kursi), dan PKI (39 kursi). Lihat *ibid.*, h. 46.

<sup>37</sup> Perjuangan politik-ideologi untuk menjadikan Islam sebagai dasar dan ideology negara, pada awalnya diperjuangkan oleh para pemimpin Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo, K. H. Mas Mansyur, Abdul Kahar Muzakkar, K. H. Wahid Hasyim, K. H. Masykur, Agus Salim, dan lain sebagainya. Di dalam periode konstituante, perjuangan itu dilanjutkan oleh M. Natsir, Hamka, Isa Ansahani, dan Osman Ralibi. Lihat Fachry Ali dan Bahtiar Efendy, *op. cit.*, h. 90.

<sup>38</sup> Mohammad Natsir, *Islam sebagai Dasar Negara* (Bandung: Segi Arsy, 2004), h. 57.

atau 67 %. Oleh karena itu, muncul usulan kembali ke UUD 45. Usulan ini didukung PNI, PKI dan IPKI, sementara golongan Islam menolak.

Akhirnya Majelis Konstituante dianggap tidak mungkin menjalankan tugasnya. Dengan demikian, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden RI sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang, yang isinya: membubarkan Majelis Konstituante, kembali ke UUD 45, dan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara.<sup>39</sup> Akibatnya, perjuangan umat Islam untuk konstituante menjadi pudar lagi.

Seminggu setelah Dekrit 5 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet Djuanda yang mengembalikan mandatnya pada 6 Juli. Kabinet Djuanda adalah kabinet peralihan dari periode Demokrasi Parlementer ke periode Demokrasi Terpimpin.<sup>40</sup>

Sejak diterapkannya Demokrasi Terpimpin oleh Soekarno, Indonesia mengalami masa yang disebut Orde Lama. Walaupun mendapatkan tantangan dari kelompok Islam yang dipimpin oleh Ketua Masyumi waktu itu (Mohammad Natsir) yang menganggapnya sebagai sistem diktator.<sup>41</sup> Pada periode ini, secara politik umat Islam tidak saja berbeda pandangan, tapi berpecah-pecah, berhadapan dengan sistem yang diciptakan Soekarno. Persoalan pilihan untuk mendukung atau tidak mendukung dalam suatu sistem kekuasaan telah membelah umat ini menjadi dua kubu yang saling berhadapan, yaitu kubu Masyumi dengan sikapnya yang keras menentang ide Demokrasi Terpimpin, sementara kubu NU, PSII, dan Perti yang mendukung dan turut di dalamnya. Bahkan pada periode ini, Masyumi dibubarkan pada tanggal 13 September 1960 atas desakan Presiden Soekarno dengan mengeluarkan Surat Keputusan Presiden No. 200/1960 yang diumumkan pada 17 Agustus 1960. Demikian perjalanan Orde Lama dengan Demokrasi Terpimpinnya berakhir pada tahun 1965, dengan meledaknya peristiwa G 30 S PKI, kemudian lahirlah Orde Baru.

---

<sup>39</sup> Taufik Abdullah, *Sejarah...op. cit.*, h. 401

<sup>40</sup> Demokrasi Terpimpin, beroperasi sekitar enam setengah tahun (1959-1965). Demokrasi gaya baru ini telah membawa Soekarno ke puncak kekuasaannya yang memang sudah lama ia dambakan, tapi fondasinya tidak kokoh, sistem ini pulalah pada akhirnya yang membawa presiden pertama Indonesia itu ke jurang kehancuran politik untuk selama-lamanya. Dia berkubur bersama sistem yang ia ciptakan, sekalipun jasanya dalam pergerakan kemerdekaan bangsa tidak akan dilupakan orang. Lihat Ahmad Syaf'i Maarif, *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)* (Cet. I; Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), h. 49.

<sup>41</sup> Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965* (Cet. I; Jakarta: Grafiti Press, 1987), h. 354.

Ditinjau dari konteks manapun, runtuhnya Orde Lama dan bangkitnya Orde Baru tetap merupakan persoalan amat penting bagi bangsa Indonesia. Salah satu hal menarik untuk dicermati adalah dampak perubahan ekonomi dan social politik masyarakat Indonesia.

Bagi umat Islam yang selama ini tertekan, bangkit bersama tentara untuk mengamankan Negara RI dengan menumpas kaum penghianat itu. Karena merasa berjasa dalam gerakan penumpasan G 30 S/PKI, dan sekaligus menegakkan Orde Baru, umat Islam melihat ada peluang untuk kembali memainkan peranan dalam pemerintahan.<sup>42</sup>

Awalnya, kalangan umat Islam muncul harapan baru berupa akan lahirnya partai Islam baru yang dapat menampung aspirasi politiknya atau harapan adanya rehabilitasi Masyumi yang dalam era demokrasi liberal pernah mendominasi salah satu partai politik Islam terkuat. Sayang, ternyata harapan tetap tinggal harapan, karena pemerintah belum memandang perlu adanya partai Islam seperti yang didambakan itu. Di lain pihak, rekayasa sosial politik makin mendorong pemerintah untuk mengefektifkan kebijakan stabilitas politik. Apa yang terjadi adalah campur tangan pemerintah dalam berbagai segi kehidupan, termasuk politik makin kuat. Prakondisi pembangunan yang sangat terfokus pada pertumbuhan ekonomi tersebut sangat dihantui oleh ketakutan terjadinya *chaos* atau trauma politik seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

Kegigihan umat Islam dalam memperjuangkan lahirnya partai Islam baru, membuahkan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Namun dari sejarah lahirnya partai ini sudah tercium adanya gejala yang tidak sehat sekaligus mencerminkan tidak adanya kemandirian umat Islam.<sup>43</sup> Pada 5 Pebruari 1968 Jenderal Soeharto mengumumkan bahwa tidak seorang pun pemimpin bekas Masyumi diizinkan memegang peranan pimpinan dalam Parmusi baru itu. Keputusan ini merupakan suatu kekecewaan yang amat besar bagi pengikat Masyumi. Mungkin lah partai baru ini akan memiliki

---

<sup>42</sup> Sejarah telah mencatat bahwa kontribusi terbesar dalam menciptakan prakondisi kelahiran Orde Baru justru ditangan umat Islam. Betapa tidak, satu-satunya isu terbesar dalam bergairah menyumbangkan Orde Lama bukan karena motif haus kekuasaan, melainkan untuk menegakkan kebenaran yang bersandar pada tatanan moral universal, yang berasal dari sesuatu yang transcendental. Karena itulah tokoh-tokoh Muhammadiyah dan NU mengeluarkan fatwa tentang perlawanan terhadap komunis termasuk *jihadun fi sabilillah*, hukumnya wajib bagi orang setiap muslim. Lihat M. Shaleh A. Putuhena, *Islam., op. cit.*, h. 50.

<sup>43</sup> M. Rusli Karim, *Islam dan Konflik Politik Era Orde Baru* (Yogyakarta: Media Widy Mandala, 1992), h. 3.

kesempatan memperoleh simpati kaum muslimin, tanpa melibatkan para pemimpin bekas Masyumi, seperti Natsir dan Prawoto dalam kegiatan-kegiatannya.<sup>44</sup>

Ketegangan mencapai puncaknya pada kongres pertama partai tersebut, yang berlangsung pada tanggal 4-7 Nopember di Malang, yang diprediksi bahwa Mohammad Roem akan menjadi ketua partai tersebut. Tetapi pada saat itu diterima sebuah telegram dari pemerintah di Jakarta yang mengingatkan bahwa sikap pemerintah terhadap persoalan ini tidak berubah, dalam artian bahwa Muhammad Roem tidak dapat direstui pemerintah sebagai ketua partai Islam baru itu.<sup>45</sup>

Demikian pula kekecewaan-kekecewaan lain yang dialami umat Islam pada periode ini hingga akhir tahun 1980-an.<sup>46</sup> Sikap pemerintah seperti itu menimbulkan kesan dan pandangan bagi umat Islam bahwa pemerintah Orde Baru adalah pemerintah sekuler.

Kebijakan pemerintah Soekarno dan Soeharto terhadap pergerakan umat Islam merupakan sebuah model dari berbagai kebijakan yang pernah diberlakukan oleh Belanda sampai akhir pertengahan abad ke 19. Pemerintah Belanda membedakan antara aspek keagamaan dan aspek politik Islam, dengan mentolerir aspek keagamaan dan menekan aspek politiknya. Dengan mengikuti pola pikiran yang sama birokrat dan elit militer menghancurkan kekuatan politik partai Islam.<sup>47</sup>

Tetapi, kondisi seperti digambarkan di atas, secara berangsur-angsur berubah menjelang tahun 90-an. Masa inilah yang disebut masa bulan madu antara umat Islam dan pemerintah. Di masa inilah dimungkinkan terbentuknya ICMI, Bank Muamalat, BPR Syari'ah, Pelaksanaan Festival Istiqlal, Pesantren Kilat, UU Peradilan Agama, dan lain-lain. Inilah yang disebut oleh Munawir Sjadzali bahwa aspirasi umat Islam justru lebih banyak terakomodasi di saat Indonesia tidak ada partai Islam. Dan syiar Islam

---

<sup>44</sup> B. J. Baland, *op. cit.*, h. 159.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Kekecewaan lain yang dimaksud, antara lain: 1) kekecewaan atas gagalnya perjuangan umat Islam dalam legalisasi Piagam Jakarta sebagai Pembukaan UUD 45 selama sidang majelis Permusyawaratan Rakyat pada bulan Maret 1968, 2) Reaksi umat Islam atas dimasukkannya aliran kepercayaan di dalam GBHN dan status P4 pada sidang umum MPR 1978, 3) gugatan umat Islam atas diberlakukannya Pancasila sebagai asas tunggal bagi parpol dan ormas pada sidang umum MPR 1982, 4) penanganan peristiwa Tanjung Periok pada 1984, dan lain sebagainya.

<sup>47</sup> Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, diterjemahkan oleh Ghurfon A. Mas'adi dengan judul *Sejarah Sosial Umat Islam Bagian Ketiga* (Jakarta: Rajawali Press, 1999), h. 346.

lebih berkembang justru pada saat tidak ada lagi partai berbenderakan Islam yang mengaku mewakili perjuangan umat Islam.<sup>48</sup>

Mungkin pemerintah Orde Baru telah melihat bahwa Pancasila dan UUD 45 telah aman yang ditandai dengan bantahan kelompok Islam tentang adanya ekstrim kanan di kalangan umat Islam serta fatwa ulama NU tentang Negara Pancasila sebagai bentuk yang final. Karena itu, sejak tahun 1990, Presiden Soeharto merubah sikap antipati terhadap Islam menjadi simpati. Perubahan itu terlihat dengan memberikan restu atas berdirinya ICMI pada akhir tahun 1990 dan sekaligus mengizinkan Habibi menjadi ketua umumnya.

Namun beberapa tahun kemudian, rezim Orde Baru tidak mampu lagi bertahan. Akhirnya pada 21 Mei 1998 Soeharto resmi mengundurkan diri dan menyerahkan kepada habibi jabatan Presiden RI., maka berakhir pulalah periode ini, dan lahirlah periode reformasi.

Kelompok Islam ideologis muncul kembali pada era reformasi. Dalam sidang MPR 1999, partai-partai Islam yang terdiri atas PPP, PBB, dan partai Keadilan kembali mempersoalkan berlakunya syari'at Islam bagi pemeluknya, meskipun usul itu tidak mendapat sambutan. Ketika pemilu 2004 berlangsung, partai-partai tersebut tidak lagi memperjuangkan syari'at Islam dalam konstitusi, sebagaimana dijanjikan oleh Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Karena itu, perjuangan Islam sebagai ideologi lambat laun hilang dari aspirasi partai politik Islam dan digantikan dengan Islam sebagai etika politik dalam satu ideology nasional.<sup>49</sup>

Fenomena lain yang muncul di era reformasi adalah gerakan-gerakan yang menentang kebijakan Amerika terhadap Islam dan beberapa Negara Islam, seperti majelis Mujahidin Indonesia, tetapi semuanya dalam rangka etika politik. Demikian juga gerakan-gerakan anti kemaksiatan, seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Lasykar Jihad terbentuk karena berbagai masalah yang bertalian dengan kondisi kehidupan umat Islam Indonesia. Di Sulawesi Selatan lahir kembali tuntutan untuk pelaksanaan syariat Islam melalui Perda yang disuarakan oleh Komite Persiapan Pelaksanaan Syariat Islam

---

<sup>48</sup> A. Ubdaillah dkk, *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madinah* (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), h. 131.

<sup>49</sup> M. Shaleh A. Putuhena, *op. cit.*, h. 57-58.



(KPPSI). Demikian pula kelompok-kelompok yang muncul kemudian dan menyuarakan negara khilafah, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Wahdah Islamiyah.

### **Kesimpulan**

Islam politik masa kesultanan (abad ke 13-17 sudah terbentuk kultur politik Islam berupa pemakaian simbol-simbol tradisi politik Islam, seperti penggunaan aksara Arab-Melayu untuk membuat dokumen resmi negara, penggunaan tahun Hijriyah untuk kalender resmi pemerintah, dan adanya masjid kerajaan. Sultan pada periode ini menjalankan dua fungsi utama, sebagai penguasa dan sebagai pelindung agama Islam.

Pada zaman penjajahan Belanda, ketika Sultan kehilangan otoritas dan simbol-simbol Islam kehilangan makna pada abad ke 18, maka kekuatan Islam politik berada di tangan pribadi atau kelompok Islamis yang berada di luar struktur kesultanan. Dalam kondisi seperti ini, Islam digunakan sebagai acuan etika politik, sehingga kaum Islamis mengadakan perlawanan seperti diperlihatkan oleh kaum Paderi, ulama Aceh, Pangeran Diponegoro, dan ulama tarekat di Banten pada abad ke 19.

Masa pendudukan Jepang (1942-1945), Islam dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan. Karena itu Jepang berusaha merangkul umat Islam, dan menjanjikan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia yang mayoritas muslim. Kelompok Islamis memperjuangkan Islam sebagai ideologi dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI, tetapi tidak berhasil.

Setelah Indonesia merdeka kelompok Islamis memperjuangkan Islam sebagai ideologi politik dalam sidang-sidang majelis konstituante (1956-1959) tetapi lagi-lagi tidak berhasil. Sementara itu sebagian Islamis menjadikan Islam sebagai ideologi negara dengan mendirikan Darul Islam/Negara Islam Indonesia, seperti yang dilakukan Kartosuwiryo di Jawa Barat, Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan, dan Daud Beureuh di Aceh.

Pada masa Orde Baru (1965-1998), awalnya presiden Soeharto memandang Islam sebagai ideologi-politik yang bisa mengancam posisi Pancasila dan UUD 45, karenanya, Soeharto dianggap sekuler dan menganut aliran kepercayaan dan kebatinan. Tetapi tahun 1990, merupakan titik balik politik Islam Presiden Soeharto, merangkul umat Islam untuk memperkuat posisinya dan untuk mengamankan Pancasila dan UUD

45. Karena itu kelompok Islam tidak memperjuangkan lagi Islam sebagai ideologi politik, dan negara Islam bukan lagi menjadi cita-cita umat Islam.

Pada era reformasi, muncul gerakan-gerakan anti kemaksiatan, seperti Lasykar Jihad dan Front Pembela Islam (FPI), di Sulawesi Selatan lahir tuntutan pelaksanaan syari'at Islam melalui Perda oleh Komite Persiapan Pelaksanaan Syari'at Islam (KPPSI). Juga lahir kelompok-kelompok yang mendambakan berdirinya negara khilafah, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Wahdah Islamiyah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik (ed). *Sejarah Umat Islam Indonesia*. Jakarta: MUI, 1992.
- Abdullah, Taufik. "Islam dan Pembentukan Tradisi di Asia Tenggara" dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique (ed). *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Ali, Fachry dan Bahtiar Effendy. *Merambah Jalan Baru Islam*. Bandung: Mizan, 1986.
- Al-Marsudi, Subandi. *Pancasila dan UUD 45 dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Anshari, Endang Saifuddin. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. Bandung: Pustaka, 1983.
- Arnold T. W. *The Preaching of Islam*. London: Constable & company Ltd., 1913.
- Azra, Azyumardi. *Renaissans Islam Asia Tenggara, Sejarah Wacana dan Kekuasaan*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1999.
- Boland, B. J. *Pergumulan Islam di Indonesia 1946-1972*. Jakarta: Grafiti Pers, 1985.
- De Graaf, H. J. dan Th. G. Th. Pigeaud. *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa*. Jakarta: Grafiti Pers, 1989.
- Federspiel, Howard M. *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.
- Karim, M. Rusli. *Islam dan Konflik Politik Era Orde Baru*. Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992.
- Kartodirdjo, Sartono, dkk. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru*, jilid 1. Jakarta: Gramedia, 1987.
- Lapidus, Ira M. *A History of Islamic Societies*, Terj. Ghurfon A. Mas'adi. *Sejarah Sosial Umat Islam Bagian Ketiga*. Jakarta: Rajawali Press, 1999.
- Maarif, Ahmad Syafi'i. *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES, 1996.
- Maarif, Ahmad Syafi'i. *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988.

- Mattulada. "Agama Islam di Sulawesi Selatan" dalam Taufik Abdullah (ed). *Islam dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Natsir, Mohammad. *Islam sebagai Dasar Negara*. Bandung: Segi Arsy, 2004.
- Noer, Deliar. *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta: Grafiti Press, 1987.
- Priggodigdo, A. G. *Perubahan Kabinet Presidensial Menjadi Parlementer*. Yogyakarta: Yayasan Fonds UGM, t.th.
- Putuhena, M. Shaleh A., *Historiografi Haji Indonesia*. Yogyakarta: LKIS, 2007.
- Putuhena, M. Shaleh A., "Islam dan Politik, Pergumulan tanpa Akhir: Rekonstruksi Pantulan Pengalaman Indonesia" dalam *Pidato Pengukuhan Guru Besar* (Makassar: Fakultas Adab IAIN Alauddin, 2004).
- Ricklefs, M. C. A. *History of Modern Indonesia*. London: The MacMillan Press, 1983.
- Syamsuddin, M. Din. *Islam dan Politik Era Orde Baru*. Jakarta: Logos, 2001.
- Sunanto, Msurifah. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Steenbrink, Karel A. *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Tjandrasasmita, Uka. "Proses Kedatangan Islam dan Munculnya Kerajaan-Kerajaan Islam di Aceh" dalam A. Hasymy. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Al-Maarif, 1993.
- Ubdaillah, A. dkk. *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madinah*. Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.
- Van Dijk, C. *Darul Islam; Sebuah Pemberontakan*. Jakarta: Grafiti Pers, 1999.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Rajawali, 1994.